Skip to Main Content

ANALISIS RASIO KEMAMPUAN PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI TOLOK UKUR KEMANDIRIAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2014-2018 (STUDI KASUS KABUPATEN TUBAN)

by Linda Devi Eka Indriyaningsih

FILE	EKONOMI_DAN_BISNIS_1231600042_LINDA_DEVI_EKA.I..PDF (163.63K)		
TIME SUBMITTED	17-JAN-2020 11:30AM (UTC+0700)	WORD COUNT	2969
SUBMISSION ID	1242937631	CHARACTER COUNT	18063

ANALISIS RASIO KEMAMPUAN PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI TOLOK UKUR KEMANDIRIAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2014-2018
(STUDI KASUS KABUPATEN TUBAN)

Oleh :

Linda Devi Eka Indriyaningsih

Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Lindadevieka@gmail.com

ABSTRAK

Otonomi daerah merupakan hak yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengatur sendiri pemerintahannya. Menggali, mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada dalam wilayah untuk mencukupi kebutuhan pemerintahannya. Semakin baik pengelolaan otonomi, semakin baik pula kemandirian suatu daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah sebagai tolok ukur kemandirian keuangan tahun anggaran 2014-2018 kabupaten Tuban. Dengan menggunakan analisis rasio yaitu, rasio efektivitas pendapatan asli daerah, rasio efisiensi keuangan daerah, rasio derajat otonomi fiskal, rasio indeks kemampuan rutin, dan rasio kemandirian keuangan daerah. Data yang di pakai ialah sekunder yang bersumber dari Badan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Tuban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari kemampuan keuangan yang dimiliki kabupaten Tuban, belum bisa dikatakan sebagai pemerintah daerah yang mandiri. Karena pendapatan asli daerah kabupaten Tuban masih belum bisa mencukupi belanja rutinnya untuk menyelenggarakan proses pemerintahan. Sehingga untuk mencukupinya, pemerintah daerah kabupaten Tuban

masih bergantung kepada bantuan dana dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi ataupun pihak ekstern lainnya.

Kata Kunci : Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Derajat Otonomi Fiskal, Rasio Indeks Kemampuan Rutin dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.

Pendahuluan

Otonomi daerah, ada sejak diberlakukannya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah serta UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Otonomi daerah merupakan hak yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengatur pemerintahannya dengan bertanggungjawab. Menggali, mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada pada wilayahnya. Dengan tujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan suatu daerah. Meningkatkan pelayanan publik dan mengurangi kesenjangan daerah dengan lebih efisien dan *responsive* terhadap kebutuhan dan potensi yang dimiliki suatu daerah.

Menurut (Bastian, 2001 dalam Yulianah 2016) Tujuan otonomi daerah pada dasarnya diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara nyata, optimal, terpadu, dan dinamis, serta bertanggungjawab, sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan terhadap daerah dan memberikan peluang untuk koordinasi tingkat daerah.

Dengan demikian dapat dijadikan motivasi dan juga dorongan bagi

pemerintah daerah untuk melaksanakan pemerintahannya dengan sebaik mungkin, memaksimalkan dan mengoptimalkan pemanfaatan semua potensi yang dimiliki di daerah masing-masing dengan tujuan mengembangkan daerah.

Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah tidak lepas dari kemampuan dalam bidang keuangan yang merupakan salah satu indikator penting dalam menghadapi otonomi daerah.

Sebagai penggerak roda pemerintahan, pemerintah daerah diserahi tugas wajib dalam pelayanan masyarakat. Yaitu menjalankan pembangunan, pemerataan ekonomi, dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah agar bisa di nilai keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya.

Tinjauan Pustaka

1. Otonomi Daerah

Undang-undang yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah ialah UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 5 yang menyatakan bahwa, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Undang-undang yang terkait adalah UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan UU No. 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat (8), (9), (10) tentang Pemerintah Daerah. Ada tiga dasar sistem hubungan antara pusat dan daerah yaitu Desentralisasi, Dekonsentralisasi dan tugas pembantuan.

2. **Keuangan Daerah**

Keuangan Daerah Di atur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sehingga dalam pengelolaannya, pemerintah daerah dapat mengelola dengan tertib, efisien, efektif, ekonomis, transparan,

bertanggungjawab dan taat peraturan perundang-undangan serta memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Dimana keuangan daerah terdiri dari :

a) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Di atur pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Bentuk dan susunan APBD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 yang terdiri atas tiga bagian. Yaitu Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Anggaran daerah yang merupakan salah satu alat yang memegang peranan penting dalam upaya meningkatkan pelayanan publik yang didalamnya tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah.

b) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang bersumber dari dalam wilayah otonomi daerah. Pemerintah daerah harus bisa menggali sendiri sumber kekayaan atau pendapatan yang ada pada wilayah otonomnya untuk memenuhi kebutuhan pemerintahan daerah. Di dalam pendapatan asli daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, retribusi perizinan tertentu, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang disahkan.

c) Dana Perimbangan atau Pendapatan Transfer

Dana perimbangan atau pendapatan transfer ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah otonomi. Meliputi dana bagi hasil pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.

d) Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Terdiri dari penjualan kekayaan daerah, pendapatan bunga, pajak reklame, keuntungan selisih tukar rupiah terhadap mata uang Negara asing, jasa giro, *discount* komisi dan bentuk lain balas jasa atas pengadaan barang, penjualan barang dan jasa oleh daerah.

3. Rasio Kemampuan Keuangan Daerah

a) Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektivitas pendapatn asli daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memonilisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) sesuai dengan yang ditergetkan

$$RKPAD = \frac{Realisaasi\ PAD}{Anggaran\ PAD} \times 100\%$$

Tabel 1. Kriteria Efektivitas

No.	Persentase	Keterangan
1	Diatas 100%	Sangat Efektif
2	90%-100%	Efektif
3	80%-90%%	Cukup Efektif
4	60%-80%	Kurang Efektif
5	Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Yulianah (2017)

Pendapatan asli daerah dikatakan sudah efektif apabila hasil persentase rasio diatas 100%. Yang artinya realisasi pendapatan asli daerah melampaui yang ditargetkan.

b) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Membandingkan antara realisasi belanja daerah dengan realisasi pendapatan daerah, guna untuk mengetahui besarnya biaya yang dikeluarkan dalam memperoleh pendapatan yang diterima.

$$REKD = \frac{Realisasi\ Belanja\ Daerah}{Realisasi\ Pendapatan\ Daerah} \times 100\%$$

Tabel 2. Kriteria Efisiensi

No.	Persentase	Keterangan
1	Diatas 100%	Tidak Efisien
2	90%-100%	Kurang Efisien
3	80%-90%	Cukup Efisien
4	60%-80%	Efisien
5	Kurang dari 60%	Sangat Efisien

Sumber : Yulianah (2017)

Keuangan daerah dikatakan efisien ketika hasil persentase kurang dari 60%. Yang artinya realisasi pendapatan daerah lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi belanja rutin daerah.

c) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan ini merupakan suatu ukuran untuk menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kebutuhan atau kegiatan kepemerintahannya. Seperti pelayanan umum dan pembangunan.

$$KKD = \frac{\textit{Pendapatan Asli Daerah}}{} \times 100\%$$

Tabel.3. Pola Hubungan Kemandirian dan Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Persentase %	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0%-25%	Instrutif
Rendah	26%-50%	Konstultatif
Sedang	51%-75%	Partisipatif
Tinggi	76%-100%	Delegatif

Bantuan Pempus/Prov/pinjaman

Sumber : Sijabat dkk (2014) dalam Anggraeni (2015)

Keuangan daerah dikatakan mandiri apabila hasil persentase rasio antara 76%-100%. Dengan artian bahwa pendapatan asli daerah sudah mampu mencukupi kebutuhan kepemerintahannya, sehingga tidak memerlukan ataupun bergantung pada bantuan dana dari pihak ekstern seperti pemerintah pusat, provinsi ataupun pinjaman lainnya.

d) Rasio Derajat Otonomi Fiskal

Pengukuran menggunakan derajat otonomi fiskal ini ialah untuk mengetahui sejauh mana pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Hal ini merupakan ciri utama suatu daerah otonom bisa dikatakan telah mampu berotonomi. Yang artinya, pemerintah daerah harus mampu menggali sumber-sumber keuangannya sendiri, pemanfaatan dan juga pengelolaan.

$$DOF = \frac{\textit{Pendapata Asli Daerah}}{\textit{Total Pendapatan Daeran}} \times 100\%$$

Tabel 4. Kategori Kemampuan Daerah

DOF(%)	Kemampuan Kauangan	IKR (%)
0,00-10,00	Sangat Kurang	0,00-10,00
10,01-20,00	Kurang	10,01-20,00
20,01-30,00	Sedang	20,01-30,00
30,01-40,00	Cukup	30,01-40,00
40,01-50,00	Baik	40,01-50,00
>50,01	Sangat Baik	>50,01

Kemampuan daerah dalam berotonomi bisa dikatakan baik ketika hasil persentase diatas 50%. Yang artinya pendapatan asli daerah lebih unggul dibandingkan jumlah pendapatan daerah.

e) Indeks Kemampuan Rutin

Indeks Kemampuan Rutin ini merupakan cerminan dari kemampuan pemerintah daerah. Sejauh mana pendapatan asli daerah mampu membiayai belanja rutin kepemerintahannya.

$$IKR = \frac{\textit{Pendapatan Asli Daerah}}{\textit{Total Belanja Rutin}} \times 100\%$$

Tabel 6. Efisiensi Keuangan Daerah Kab. Tuban Tahun 2014-2018

Thn.	Realisasi Belanja Daerah	Realisasi Pendapatan Daerah	% Efisiensi	Ket.
2014	1,768,024,608,472	1,823,513,656,640	96.96 %	Kurang Efisien
2015	1,998,111,557,092	2,017,855,147,213	99.02 %	Kurang Efisien
2016	2,219,079,048,791	2,183,545,377,124	101.63%	Tidak Efisien
2017	2,810,133,316,551	2,254,573,848,769	124.64%	Tidak Efisien
2018	2,415,211,580,095	2,455,664,334,977	98.35 %	Kurang Efisien
Rata-rata	2,242,112,022,200	2,147,030,472,945	104.12%	Tidak Efisien

Sumber : BPPKAD Kabupaten Tuban (Diolah Penulis)

Suatu pemerintah daerah yang memiliki indeks kemampuan rutin diatas 50% yang artinya pendapatan asli daerah sudah dapat menopang kebutuhan belanja rutin daerah. Dan hal tersebut sudah jelas menjadi cerminan kemampuan keuangan daerah yang sangat baik.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif deskriptif. Artinya penelitian yang menggunakan metode perhitungan pengukuran terhadap data keuangan yang diperoleh untuk memecahkan permasalahan yang ada. Serta mendeskripsikan argumen yang akurat mengenai fenomena sesuai fakta-fakta yang ada.

Dengan upaya untuk mendekripsikan, menganalisis, dan menginterpretasikan kemampuan pemerintah daerah pada aspek keuangan yang diukur menggunakan analisis rasio.

Fokus penelitian ini adalah pada kemampuan pemerintah daerah sebagai tolok ukur kemandirian keuangan tahun anggaran 2014-2018 kabupaten Tuban.

Jenis data penelitian ini adalah data sekunder, dengan teknik pengumpulan data yang bersumber dari Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Tuban. Dan data dari website resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Yang berupa Laporan

Realisasi Anggaran dan APBD Kabupaten Tuban.

Metode analisis penelitian ini menggunaan lima pengukuran rasio. Yaitu rasio efektivitas pendapatan asli daerah, rasio efisiensi keuangan daerah, rasio derajat otonomi fiskal, rasio kemandirian keuanagn daerah dan indeks kemampuan rutin.

Pembahasan

1. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Tabel 5. Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kab. Tuban 2014-2018

Thn.	Realisasi PAD	Anggaran PAD	% Efektivitas	Efektifitas
2014	291,079,944,393	258,374,944,832	112.66%	Efektif
2015	345,965,620,446	303,705,935,159	113.91%	Efektif
2016	364,133,296,890	338,225,312,035	107.66%	Efektif
2017	405,151,374,672	462,826,997,687	87.54%	Tidak Efektif
2018	442,531,646,744	417,268,516,865	106.05%	Efektif
Rata-rata	369,772,376,629	356,080,341,316	105.56%	Efektif

Sumber : DJPK dan BPPKAD Kab. Tuban (Diolah Penulis)

Berdasarkan perhitungan rasio efektivitas pendapatan asli daerah kabupaten Tuban menunjukkan bahwa mulai tahun 2014 sampai dengan 2018 rata-rata persentase efektivitas sebesar 10.56%, hal tersebut dapat dikatakan bahwa dalam memaksimalkan potensi pendapatan asli daerah, pemerintah kabupaten Tuban semakin baik. Pada rentang tahun tersebut, pemerintahan kabupaten Tuban mengalami tingkat efektivitas yang rendah hanya pada tahun 2017 yaitu dengan persentase sebesar 87.54%.

Yang artinya, pemerintah daerah kabupaten Tuban dalam memobilisasi pendapatan asli daerah belum sesuai dengan apa yang sudah ditargetkan.

2. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Tabel 6. Efisiensi Keuangan Daerah Kab. Tuban Tahun 2014-2018

Thn	Realisasi Belanja Daerah	Realisasi Pendapatan Daerah	% Efisiensi	Keterangan
2014	1,768,024,608,472	1,823,513,656,640	96.96 %	Kurang Efisien
2015	1,998,111,557,092	2,017,855,147,213	99.02 %	Kurang Efisien
2016	2,219,079,048,791	2,183,545,377,124	101.63 %	Tidak Efisien
2017	2,810,133,316,551	2,254,573,848,769	124.64 %	Tidak Efisien
2018	2,415,211,580,095	2,455,664,334,977	98.35 %	Kurang Efisien
Rata-rata	2,242,112,022,200	2,147,030,472,945	104.12 %	Tidak Efisien

Sumber : BPPKAD Kabupaten Tuban (Diolah Penulis)

Berdasarkan perhitungan data pada tebrl rasio efisiensi keuangan daerah, menujukkan bahwa rata-rata tingkat efisiensi di kabupaten Tuban mencapai persentase sebesar 104.12% dengan keterangan "tidak efisien" hal ini berarti output yang dimiliki kabupaten Tuban lebih besar

dibandingkan input, sehingga menghasilkan persentase tingkat efisiensi yang tidak efisien. Karena peemerintah daerah dikatakan efisien jika rasio yang dicapai kurang dari 100%. Tingkat efisiensi terbaik selama kurun waktu tahun 2014 sampai dengan 2018 terdapat pada tahun 2014, dengan persentase rasio efisiensi sebesar 96.96%.

3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tabel 7. Kemandirian Keuangan Daerah Kab. Tuban Tahun 2014-2018

Thn.	PAD	Bantuan Pempus atau pemprov dan pinjaman	% KKD	Tingat Kemandirian	Pola Hubungan
2014	291,079,944,393	1,499,334,455,247	19.41 %	Rendah Sekali	Instruktif
2015	345,965,620,446	1,636,387,125,767	21.14 %	Rendah Sekali	Instruktif
2016	364,133,296,890	1,766,130,500,234	20.62 %	Rendah Sekali	Instruktif
2017	405,151,374,672	1,841,700,774,097	22.01 %	Rendah Sekali	Instruktif
2018	442,531,646,744	1,929,455,162,353	22.94 %	Rendah Sekali	Instruktif
Rata-rata	369,772,376,629	1,734,601,603,540	21.22 %	Rendah Sekali	Instruktif

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (Diolah Penulis)

Berdasakan hasil perhitungan pada tabel di atas, kemampuan keuangan pemerintah kabupaten Tuban tergolong masih rendah sekali dan pola hubungannya termasuk pola hubungan instruktif dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah). Tingkat rasio terendah terjadi pada tahun 2014 dimana nilainya sebesar 19.41% dan tingkat rasio tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 22.94%. Dimana pada tiap tahunnya terhitung dari tahun 2014-2018 tingkat kemandirian keuangan daerah kabupaten Tuban mengalami kenaikan sedikit demi sedikit. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pihak ekstern (terutama bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi).

4. Rasio Derajat Otonomi Fiskal (DOF)

Berdasarkan tabel berikut perhitungan pada Rasio Derajat Otonomi Fiskal menunjukkan bahwa mulai tahun 2014-2018 rata-rata mengalami peningkatan di tiap tahunnya. Dengan rasio rata-rata selama 5 tahun sebesar 17.16% yang artinya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tuban masih

kurang mampu dalam menyumbang pendapatan daerah. Hal ini juga dapat di lihat dari jumlah Pendapatan Asli Daerah yang selalu meningkat setiap tahunnya, sehingga total pendapatan daerah juga mengalami peningkatan setiap tahun. Seperti yng tercantum pada tabel, pada tahun 2014 PAD yang diperoleh sebesar Rp. 291,079,944,393 dan pada tahun 2015 sebesar Rp. 345,965,620,446. Pada tahun 2015 PAD Kbupaten Tuban mengalami peningkatan sekitar 16% dibandingkan dengan tahun 2014, peningkatan tersebut juga sebagai peningkatan PAD tertinggi selama kurun waktu tahun 2014-2018. Sedangkan total pendapatan daerah pada tahun 2014 sebesar Rp. 1,823, 513,656,640 dan pada tahun 2015 menjadi Rp. 2,017,855,147,213 dengan peningkatan sekitar 10%, dan seterusnya. Hal tersebut membuktikan bahwa peningkatan PAD kabupaten Tuban kurang mampu untuk andil dalam menyumbang total pendapatan daerah Pemerintah Kota Kabupaten Tuban.

Tabel 8. Derajat Otonomi Fiskal Kab. Tuban Tahun 2014-2018

Thn.	PAD	Total Pendapatan Daerah	% DOF	Kemampuan Keuangan
2014	291,079,944,393	1,823,513,656,640	15.96 %	Kurang
2015	345,965,620,446	2,017,855,147,213	17.15 %	Kurang
2016	364,133,296,890	2,183,545,377,124	16.68 %	Kurang
2017	405,151,374,672	2,254,573,848,769	17.97 %	Kurang
2018	442,531,646,744	2,455,664,334,977	18.02 %	Kurang
Rata-rata	369,772,376,629	2,147,030,472,945	17.16 %	Kurang

Sumber : BPPKAD Kab. Tuban (Diolah Penulis)

5. Indeks Kemampuan Rutin

Untuk mengukur dan mengetahui kemampuan keuangan daerah yang di tinjau dari kemampuan pembiayaan belanja rutin, diukur menggunakan rasio IKR. Selama lima tahun berturut-turut rasio IKR pemerintah daerah kabupaten Tuban cenderung fluktuatif , terlihat pada tahun 2014 ke tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 0,41%. Dan pada tahun 2016-2017 mengalami penurunan yaitu di tahun 2016 mengalami penurunan sekitar 0.4% dan pada tahun 2017 turun sekitar 3%. Hingga pada tahun 2018 rasi IKR mengalami peningkatan yang cukup membaik yaitu meningkat sekitar 9.8% dan

pada tahun 2018 tersebut ialah nilai rasio IKR tertinggi pada kurun waktu tahun 2014-2018 yaitu sebesar 31.89%.

Dapat diartikan bahwa kemampuan pendapatn asli daerah kabupaten Tuban belum mampu membiayai belanja rutinnya. Sehingga pemerintah daerah kabupaten Tuban harus lebih menggali lagis sumber keuangan dalam daerahnya.

Tabel 9. Indeks Kemampuan Rutin Kab. Tuban Tahun 2014-2018

Thn	PAD	Total Belanja Rutin	% IKR	Indeks Kemampuan Rutin
2014	291,079,944,393	1,146,581,509,004	25.39 %	Sedang
2015	345,965,620,446	1,341,200,578,394	25.80 %	Sedang
2016	364,133,296,890	1,433,304,496,536	25.41 %	Sedang
2017	405,151,374,672	1,837,171,448,177	22.05 %	Sedang
2018	442,531,646,744	1,387,729,770,510	31.89 %	Cukup
Rata-rata	369,772,376,629	1,429,197,560,524	26.11 %	Sedang

Sumber : BPPKAD Kab. Tuban (Diolah Penulis)

Kesimpulan

Dengan kemampuan keuangan tersebut yang di ukur dengan rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Derajat Otonomi Fiskal, Kemandirian Keuangan Daerah dan Indeks Kemampuan Rutin, maka pemerintah daerah kabupaten Tuban masih belum bisa dikatakan sebagai pemerintahan daerah yang mandiri. Karena Pendapatan Asli Daerah kabupaten Tuban belum bisa mencukupi belanja rutin daerahnya sehingga untuk mencukupinya masih banyak bergantung pada bantuan dana dari pemerintah pusat, provinsi maupun pinjaman dari pihak eksternal lainnya.

Daftar Pustaka

Halim, Abdul. (2008) **Akuntansi Keuangan Daerah**. Jakarta, Salemba Empat.

Halim, Abdul. (2014). **Manajemen Keuangan Sektor Publik (Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah)**. Jakarta, Salemba Empat

Mardiasmo, (2002) **Akuntansi Sektor Publik**. Yogyakarta, ANDI

Mardiasmo, (2004) **Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah**. Yogyakarta, ANDI

Saragih, Juli P. (2010). **Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi**. Jakarta: Ghalia Indonesia

Pemerintah Pusat Republik Indonesia, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Pemerintah Pusat Republik Indonesia, Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbagan Keuangan Daerah Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Sijabat, Saleh, Wahid. 2014. *Analisis Kinerja Serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerag Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Asets Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2008-2012).* Fakultas Ilmu Administrasi Universitasn Brawijaya Malang.

Yulianah, Siti. 2017. *Pengaruh Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Efisiensi Keuangan Daerah Dan Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2010 2014*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidaytullah Jakarta.

Riris, Dwi Anggraeni. 2015. *Analisi Kemandirian Daerah, Tingkat Kemandirian Dan Efektifitas Realisasi Anggaran Tahun 2007-2011*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.

ANALISIS RASIO KEMAMPUAN PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI TOLOK UKUR KEMANDIRIAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2014-2018 (STUDI KASUS KABUPATEN TUBAN)

ORIGINALITY REPORT

%18	%17	%5	%5
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	elibskripsi.blogspot.com Internet Source	%2
2	sappilpil.blogspot.com Internet Source	%1
3	samalovernosasa.blogspot.com Internet Source	%1
4	eprints.unisnu.ac.id Internet Source	%1
5	alumni.uinjkt.ac.id Internet Source	%1
6	Sukamto Satoto, Bahder Johan Nasution. "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam PengelolaanPertambangan Mineral dan Batubara Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik", Jurnal Sains Sosio Humaniora, 2019 Publication	%1
7	oneworld-save.blogspot.com	

Internet Source

%1

8	ejurnal.unisri.ac.id Internet Source	%1
9	scholar.unand.ac.id Internet Source	%1
10	odedingo.blogspot.com Internet Source	%1
11	ijsser.org Internet Source	%1
12	www.detikinvestigasi.com Internet Source	%1
13	www.bapeda-jabar.go.id Internet Source	<%1
14	www.banyuwangikab.go.id Internet Source	<%1
15	www.peraturanpajak.com Internet Source	<%1
16	academic.oup.com Internet Source	<%1
17	www.unisbank.ac.id Internet Source	<%1
18	elyansyah-jt26.blogspot.com Internet Source	<%1
19	www.tebokab.go.id	

Internet Source

<%1

20	dimasmuhammad8.blogspot.com Internet Source	<%1
21	panetir.wordpress.com Internet Source	<%1
22	tiptiktak.com Internet Source	<%1
23	pendamping-desa.blogspot.com Internet Source	<%1
24	vdocuments.mx Internet Source	<%1
25	ahid-wahyu-fisip12.web.unair.ac.id Internet Source	<%1
26	eprints.unm.ac.id Internet Source	<%1
27	repository.unpar.ac.id Internet Source	<%1
28	digilib.uns.ac.id Internet Source	<%1
29	raypratama.blogspot.com Internet Source	<%1
30	flowerkookie.blogspot.com Internet Source	<%1
31	jurnal.unimed.ac.id	

Internet Source

<%1

32	ciburial.desa.id Internet Source	<%1
33	pkmmamajang.blogspot.com Internet Source	<%1
34	Submitted to Surabaya University Student Paper	<%1

EXCLUDE QUOTES	OFF	EXCLUDE MATCHES	OFF
EXCLUDE BIBLIOGRAPHY	ON		